

NEGARA DALAM PERSPEKTIF PLATO

Enrico Zico Sudrajat; Febrian Nanda; Pandu Azkal Azkiyai Bintang; Muhammad Fadhail;
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
muhammadfadhil2909@gmail.com

***ABSTRACT:** The country is a paradise for all its citizens. The goal is to create and guarantee happiness for all citizens, based on justice and wisdom as well as a sense of love for the motherland and solidarity. To create such conditions, all citizens must participate actively to know themselves and all the virtues that must be studied carefully and collectively. The purpose of this study is to examine Plato's concept of the state and test it in the present. The research method is qualitative research with library research. The results of his research are, according to Plato, the ideal state is an ethical community for the acquisition of virtue. Basically the state is a family where those who are citizens maintain brotherhood. Plato also said that the state was actually created or formed by the people. The formation of the state is due to the desires and needs of the people, which cannot be fulfilled individually. The important thing is that the state must make itself a service system, so that the existence of the state is needed at any time. According to him, the goal of the state is to realize the happiness and happiness of all citizens based on justice, wisdom, courage or enthusiasm and self-control in harmony and harmony in the life of the nation. To achieve state goals, citizens must have knowledge, especially good ideas, and apply them in all areas of life. What Plato championed as a form of government was an "aristocratic state", that is, a government ruled by wise intellectuals or philosophers who were guided by justice.*

***KEYWORDS:** State, Plato, Utopia*

ABSTRAK: Negara adalah surga bagi semua warganya. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan menjamin kebahagiaan bagi semua warga negara, berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan serta rasa cinta tanah air dan solidaritas. Untuk menciptakan kondisi seperti itu, semua warga negara harus berpartisipasi aktif untuk mengetahui diri mereka sendiri dan semua kebajikan yang harus dipelajari secara cermat dan kolektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep negara Plato dan mengujinya di masa kini. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitiannya adalah, menurut Plato, negara ideal adalah komunitas etis untuk perolehan kebajikan. Pada dasarnya negara adalah sebuah keluarga di mana mereka yang menjadi warga negaranya memelihara persaudaraan. Plato juga mengatakan bahwa negara sebenarnya diciptakan atau dibentuk oleh rakyat. Terbentuknya negara adalah karena keinginan dan kebutuhan rakyat, yang tidak dapat dipenuhi sendiri-sendiri. Hal yang penting adalah negara harus menjadikan dirinya sebagai sistem pelayanan, sehingga keberadaan negara dibutuhkan setiap saat. Menurutny, tujuan negara adalah mewujudkan kebahagiaan dan kebahagiaan seluruh warga negara yang dilandasi oleh keadilan, kebijaksanaan, keberanian atau semangat dan pengendalian diri dalam kerukunan dan keserasian

dalam kehidupan bernegara. Untuk mencapai tujuan negara, warga negara harus memiliki pengetahuan, terutama ide-ide bagus, dan menerapkannya di semua bidang kehidupan. Apa yang diperjuangkan Plato sebagai bentuk pemerintahan adalah "negara aristokrat", yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh para intelektual atau filsuf yang bijaksana yang dibimbing oleh keadilan.

KATA KUNCI: Negara, Plato, Utopia

I. PENDAHULUAN

Dalam pembahasan pemerintahan, khususnya di negara kita sendiri, pembahasan tentang hakikat negara seringkali diabaikan. Sebagian besar dari kita tampaknya menerima begitu saja sifat pemerintahan. Ini adalah fakta yang tak terhindarkan, hadir dan selalu hadir di setiap zaman, sehingga tidak perlu dipertanyakan sifatnya, apalagi mengapa negara seperti yang kita kenal ada dan eksis saat ini.

Diskusi spasial sebagian besar terbatas pada topik nyata, topik "baru". Misalnya kesalahan penguasa lama yang tumbang dan kelompok kepentingan politik saat ini yang memperebutkan kekuasaan dan kemenangan. Sebagian besar teori yang berkembang di Indonesia berasal dari filsuf idealis liberal seperti Rosso dan Hobbes yang menguasai Eropa dan Amerika. Teori ini menganggap bahwa negara adalah realitas manusia yang tak terelakkan. Negara tentu hadir di setiap zaman karena manusia harus mengatur dirinya sendiri. Negara kemudian dilihat sebagai mediator netral yang dapat menengahi konflik sosial.

Fakta-fakta di atas kemudian membuat penulis mempertanyakan kebenaran teori negara para filosof idealis liberal. Benarkah bumi adalah sesuatu yang definitif, semacam takdir yang tak terelakkan bagi umat manusia? Apakah negara benar-benar netral?

Implikasi dari teori ini adalah bahwa cara pihak berwenang secara umum memikul tanggung jawab sampai sekarang adalah bahwa setiap krisis dan gangguan sosial harus dibagi. Stereotip ini tampaknya bertentangan dengan premis dasar bahwa pemerintah adalah produk dari perundingan bersama, dan karena itu tugas kita bersama untuk mematuhi. Padahal, setiap kesalahan dianggap sebagai kesalahan bersama karena juga merupakan tanggung jawab bersama.

Fakta bahwa kita berbagi 32 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru, jauh dari "demokrasi" dan tidak berhasil menciptakan masyarakat sipil, orang-orang dihalangi untuk berbicara, hak-hak rakyat tidak dipahami sebagai hak fundamental, tentang urusan negara. , untuk berbicara dengan orang-orang. . diabaikan , bahkan hak rakyat digerogeti oleh penguasa (baca: KKN). Dari fenomena di atas jelaslah

bahwa keberadaan negara sangat erat kaitannya dengan moralitas pemimpin atau penguasa.

Plato berkata:

“Kalau rakyatnya baik, negaranya baik, dan kalau negaranya baik, berarti rakyatnya juga baik; Sebaliknya, jika rakyatnya buruk, negaranya buruk, artinya rakyatnya juga buruk. Negara adalah cerminan dari orang-orang yang menjadi warga negaranya” (Rapar, 1991).

Refleksi atas filosofi negara Plato mendorong penulis untuk membahasnya dalam artikel ini.

II. METODE

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menjelaskan fenomena secara mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya (Syafii, 2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, kajian pustaka dan dokumentasi. Setelah itu, data yang terkumpul diklasifikasikan menurut hasil observasi dan wawancara, kemudian data disajikan secara sistematis sesuai alur penelitian, dan terakhir ditarik kesimpulan sesuai dengan keadaan (Bungin, 2013).

III. HASIL

Bertrand Russell mengatakan bahwa negara yang ingin dibangun Plato adalah "negara utopis" (Russel, 2004). Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa utopia “berarti suatu sistem politik sempurna yang hanya ada dalam bayang-bayang (imajinasi) dan sulit atau tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan (KBBI, 2002).” Jika demikian, konsep keadaan yang diharapkan Plato pada pandangan pertama tampaknya hanya fantasi dan tidak berlaku untuk kehidupan nyata.

Dalam pemikiran Plato tentang negara banyak terkandung nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan etika dalam membangun dan mengelola negara. Plato menekankan bahwa negara harus didasarkan pada keadilan, kebijaksanaan, keberanian atau semangat dan pengekan dalam keharmonisan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Franz Magnis Suseno dalam bukunya “13 Karakter Etis” terdapat empat kebajikan utama, yaitu:

kebijaksanaan, keberanian, percaya diri dan keadilan (Suseno, 1997). Nilai-nilai yang disebutkan Plato merupakan nilai-nilai yang sangat relevan dengan realita yang dihadapi masyarakat, dimana masyarakat tetap memperjuangkan keadilan, berani membela kebenaran, mampu mengendalikan diri dan emosi serta memiliki kebijaksanaan. dalam memimpin negara dan dalam kehidupan seluruh negara

Plato mengatakan pemerintah harus mengorbankan hidupnya untuk negara dengan mengorbankan kepentingannya sendiri. Jelas bahwa pemerintah tidak mampu memerintah hanya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, mengabaikan penderitaan rakyat yang diperintahnya. Negara harus memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, agar kebahagiaan hidup dapat terwujud pada semua golongan. Bertrand Russell juga menyebutkan bahwa Republik Plato sebenarnya telah didirikan. Ini bukan sesuatu yang aneh atau mustahil seperti yang biasanya dipikirkan orang. Nyatanya, Spartan menerapkan gagasan Plato tentang negara. Pemerintahan para filsuf diadili oleh Pythagoras, Architas (pengikut Pythagoras). Sebuah negara republik bahkan didirikan di wilayah pesisir Spanyol. Namun dalam perkembangannya, negara-negara republik yang merupakan negara kecil akhirnya mengalami berbagai kegagalan akibat peperangan dan persaingan dengan negara yang lebih besar (Russel, 2004).

IV. PEMBAHASAN

A. Negara Ideal Menurut Plato

1. Pengertian dan Hakikat Negara

Pengertian kebangsaan hampir sama banyaknya dengan para pemikir, baik dari segi makna maupun pengertiannya, yang tentunya tidak terlepas dari situasi dan keadaan dalam konteks sejarah dan budayanya serta realitas kehidupan di sekitarnya. Kosakata, negara adalah:

1) suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan hukum tertinggi di suatu daerah dan ditaati oleh rakyat, 2) suatu kelompok sosial di daerah atau daerah tertentu yang diselenggarakan di bawah suatu lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, berdasarkan kesatuan politik, berdaulat, sehingga memiliki hak untuk menentukan tujuan nasionalnya sendiri.

Musdah Mulia dalam bukunya Negara Islam: Pemikiran politik Husain Haikal mengatakan:

“Negara adalah lembaga sosial buatan manusia yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebuah negara setidaknya harus memiliki tiga unsur, yaitu wilayah, penduduk dan administrasi. Dari ketiga unsur tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah adalah yang terpenting unsur dalam negara. Karena meskipun sekelompok individu telah mendiami suatu wilayah, negara tetap tidak dapat terbentuk jika ada segelintir individu yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyusun kehidupan bersama” (Mulia, 2001).

Pada saat yang sama, menurut Antonio Gramsci, “negara adalah serangkaian aktivitas praktis dan teoretis yang kompleks di mana kelas penguasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan aturan, tetapi juga mengaturnya untuk mengatasi batasan aktif kekuatan eksternal (Patria. , 1999) “Sependapat dengan pendapat tersebut Arief Budiman juga menulis yang dikutip Haryad:

“Negara hanyalah alat kelas penguasa. Namun, karena keberpihakan tersebut dapat menyebabkan negara kehilangan legitimasinya sebagai penguasa masyarakat, maka negara menciptakan ideologi. Melalui ideologi ini, negara berusaha menyembunyikan tindakannya untuk kepentingan kelas penguasa agar kekuasaannya dilegitimasi oleh semua orang yang diperintahnya (Haryadi, 2000).

Jika kita melihat pendapat Gramsci dan Arief Budiman, terlihat jelas bahwa supremasi politik dan kekuasaan negara sangat tinggi dalam masyarakat sipil. Plato kemudian mengalami fenomena ini di negaranya. Plato kecewa melihat negara tempatnya tinggal dijadikan alat pemuas nafsu para penguasa yang tidak bertanggung jawab. Ia juga melihat betapa buruknya sistem pemerintahan saat itu. Negara dirusak dan dimanjakan oleh penguasa yang korup dan pemerintahan yang sangat kotor (Rapar, 1991). Menurut Plato, nasib Athena hanya bisa tertolong dengan mengubah mata pencaharian masyarakat dan sistem pemerintahan. Oleh karena itu ia menciptakan negara yang ideal (Hatta, 1996)

Jostein Gaarder, penulis buku *Sophie's World*, mengatakan bahwa “negara ideal yang dimaksud Plato adalah negara bayangan dan negara ideal atau disebut negara utopis, yaitu negara yang diperintah oleh para filosof”. Menurut Plato, mereka mampu mengarahkan pikirannya pada kebijaksanaan. Terbentuknya suatu bangsa yang baik tergantung pada apakah ia diperintah dengan akal atau tidak. Karena kepala mengatur tubuh, filsuf harus mengatur masyarakat (Gaarder, 1998). Plato berpendapat bahwa negara dan rakyat memiliki kesamaan. Menurut Plato, keadaan ideal pada hakikatnya adalah sebuah keluarga. dia berkata:

"Di negaramu semua bersaudara." Oleh karena itu, setiap warga negara hendaknya berperilaku kekeluargaan yang mencerminkan adanya kerukunan dan kerukunan antar manusia. Baik di kalangan elite penguasa maupun di kalangan rakyat negara (Rapar, 1991).

2. Asal-mula Negara

Organisasi kelompok merupakan kebutuhan hidup manusia. Manusia adalah makhluk sosial dan politik. Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan yang memungkinkan untuk hidup dan bertahan hidup hanya dengan bantuan orang lain. Banyak bantuan dari pihak lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan suatu hari nanti. Demikian pula untuk menjamin keselamatan jiwa, setiap orang

membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan dari ancaman. Di sini negara perlu mengatur alur kegiatan koperasi untuk mencapai tujuannya.

Dari generasi ke generasi, orang Athena terus percaya bahwa negara Athena diciptakan oleh dewa Cecrops, yang kemudian menjadi raja pertama Athena (Rapar, 1991).

Sebelum zaman Socrates (guru Plato) dan Plato, pembentukan negara teokratis seperti itu tidak menguntungkan dan menyebabkan munculnya ajaran yang canggih. Protagoras, sofis terkemuka, mengatakan bahwa negara diciptakan oleh manusia sendiri. Pada awalnya hidup sendiri tidak memiliki pasangan, namun ternyata hidup sendiri ternyata membawa terlalu banyak kesulitan jika anda sadari, terutama yang datang dari luar misalnya gangguan binatang buas, bencana alam. Menyadari bahwa sulit bagi orang untuk hidup sendiri, lahirlah sebuah negara di mana orang hidup tidak sendirian tetapi berkelompok.

Dia menegaskan ajaran Protagoras bahwa negara diciptakan atau dibentuk oleh orang-orang, tetapi Platon melihat gangguan dan kesulitan yang harus diatasi orang tidak datang dari dia sendiri.

Bagi Plato, lahirnya negara dimulai dengan keinginan dan kebutuhan manusia yang banyak dan beragam yang tidak dapat dipenuhi dan dipenuhi oleh kekuatan dan kemampuan sendiri (Rapar, 1991). Keinginan dan kebutuhan ini hanya dapat terpenuhi ketika orang berkumpul dan bekerja sama untuk saling menjaga kekurangan, dimana negara bagi Platon dipandang sebagai sistem layanan yang menuntut tanggung jawab setiap warga negara, saling memahami, memberi dan menerima, terima, tukar manfaat, mempertimbangkan kebutuhan warga dan saling membangun

Teori Plato tentang asal muasal kondisi ini juga didukung oleh para pemikir Barat modern seperti Thomas Hobbes dan J.J. Rousseau. Adalah kesalahan besar untuk berpikir bahwa Plato menciptakan negara idealnya untuk melarikan diri dari berbagai kenyataan yang tidak menyenangkan dan pengalaman pahit yang sangat menyakitkan hatinya

sehingga dia dapat membenamkan dirinya dalam dunia mimpi dan fantasi yang mulia. Plato mencoba. untuk menciptakan keadaan ideal yang realistis (Haryadi, 2000).

Dengan demikian, jelas bahwa negara ideal Plato bukanlah negara imajiner (utopis), tetapi adalah kesalahan besar untuk berpikir bahwa Plato menciptakan negara idealnya sebagai pelarian dari berbagai realitas yang tidak nyaman dan pengalaman menyakitkan yang begitu menyakitkan. ke hati sehingga dia bisa membenamkan dirinya dalam dunia mimpi dan fantasi yang mengasyikkan. Nyatanya, Plato berusaha menciptakan negara ideal yang realistis dan tidak korup (Rapar, 1991).

3. Tujuan Negara

Ketika Plato mengatakan bahwa asal mula negara terletak pada keinginan dan kebutuhan rakyat, ini berarti negara dibentuk oleh dan untuk rakyat. Bagi Plato, menurut ajaran etika yang ia kembangkan selama belajar filsafat, tujuan negara disinkronkan dengan tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan dan kebahagiaan semua warga negara yang tinggal di negara itu (Rapar, 1991).

Mohammad Hatta menjelaskan bahwa yang dimaksud Plato dengan kenikmatan hidup bukanlah memuaskan keinginan dunia ini. Tetapi kesenangan hidup dicapai dengan mengenali dengan benar nilai barang yang dimaksudkan. Mengingat gagasan tentang kebaikan, keadilan harus dicapai dalam kehidupan sosial. Apa yang baik bagi masyarakat adalah baik bagi individu. Tidak boleh ada konflik antar kepentingan individu (Hatta, 1996).

Dalam konteks ini, Plato kembali menyebut salah satu masalah utama negara, yaitu keamanan rakyat, bukan keamanan penguasa. Rakyat yang berkuasa harus mengabdikan hidupnya kepada penguasa dengan mengorbankan kepentingannya sendiri (Hadiwijono, 1993).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, untuk mencapai kegembiraan dan kebahagiaan dalam hidup, manusia harus memiliki ilmu yang membuat dirinya bijaksana untuk mengeksplorasi segala hal hingga ke ide. Karena gagasan tertinggi di dunia gagasan adalah gagasan tentang

kebaikan, kegembiraan dan kebahagiaan sejati hidup terletak pada keberhasilannya menjalani kehidupan yang baik. Dalam konteks ini, negara ideal itu penuh dengan kebaikan dan kebajikan. Lebih khusus lagi, dalam bukunya *Republic*, Plato menjelaskan bahwa negara harus didasarkan pada keadilan, kebijaksanaan, keberanian atau semangat, dan pengendalian kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bernegara. Hanya keadaan seperti itu yang dapat mencari kegembiraan dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan setiap warga negara (Rapar, 1991).

Tujuan negara yang dirumuskan Plato nampaknya memiliki kemiripan dengan tujuan negara Islam (baca: negara setelah Islam) oleh reformis Mesir Husain Haikal. Menurutnya, tujuan negara Islam adalah terwujudnya hak, kebebasan, dan kesejahteraan yang dilandasi nilai-nilai spiritual bagi seluruh warga negara (Mulia, 2001). Memang Plato berharap setiap warga negara harus menunaikan kewajibannya dan sebaliknya negara harus memenuhi hak-hak warga negaranya. Negara yang ideal harus dapat menempatkan hak dan kewajiban pada tempatnya yang tepat serta mengatur dan memeliharanya sedemikian rupa sehingga selalu konsisten dan konsisten, karena hanya dengan demikian negara dapat memenuhi tugasnya serasi mungkin dengan pelaksanaannya. . tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan semua warga negara (Rapar, 1991).

4. Bentuk-bentuk Negara

Dalam bukunya *Republic* bagian VIII, Plato menyebutkan ada lima macam bentuk negara. Menurutnya kelima bentuk negara itu tidak dapat hidup kekal, karena dasar-dasar kehidupan yang prinsipil yang dijalankan mengubah kesehatan mereka menjadi sakit, dan akhirnya membunuh mereka. Bentuk-bentuk negara itu adalah :

“a. Aristokrasi: penguasa pemerintahan dari kalangan cendekiawan atau para budiman yang memerintah dengan bijaksana dengan berpedoman pada keadilan.

b. Timokrasi: pemerintahan dijalankan oleh orang-orang yang bertujuan mencapai kemasyhuran dan kehormatan, bukan untuk menciptakan keadilan.

c. Oligarki: tampuk pemerintahan dipegang oleh golongan harta- wan dan tujuan mereka adalah untuk memperkaya diri sendiri.

d. Demokrasi: pemerintahan berada di tangan kalangan rakyat biasa dimana kebebasan sangat diutamakan.

e. Tirani: bentuk pemerintahan yang menindas bahkan menelan rakyatnya, sehingga dia berkuasa dengan sewenang-wenang dan tak terbatas. Tirani itu timbul akibat kemerosotan demokrasi. Tirani merupakan bentuk yang paling jauh dari bentuk negara ideal yang didambakan Plato” (Rapar, 1991).

Menggunakan dialektika, Plato menunjukkan bahwa aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling ideal. Secara harfiah aristokrasi, berasal dari kata aristos: yang terbaik dan kreatin:

Kontrol. Menurut Plato, hal ini karena hanya warga negara yang terbaik dan paling cakap yang dapat diangkat menjadi kepala negara (Bertens, 1996). Plato kemudian menyadari bahwa negara ideal yang diidam-idamkannya, diperintah dan diperintah oleh para sarjana atau yang disebutnya raja-filsuf, adalah negara yang terlalu sempurna bagi manusia. Dalam Buku IX Republik ia juga meramalkan bahwa negara ideal sebenarnya bukan di dunia ini melainkan di sorga, yaitu di dunia ide, di mana model negara ideal terpelihara dengan baik (Rapar, 1991). Terakhir, dalam karyanya Politicus, Plato membuat klasifikasi negara yang lebih baik dan realistis. Dalam buku ini Plato menyebutkan bahwa negara memiliki enam bentuk, yang kemudian ia bagi menjadi dua, yaitu tiga bentuk kelompok hukum dan tiga bentuk kelompok tidak sah. Dari golongan yang mengenal hukum yaitu dari negara yang memiliki hukum; Bentuk pemerintahan terbaik adalah monarki, lalu aristokrasi, lalu demokrasi. Sekaligus dari golongan yang tidak mengenal hukum yaitu negara yang tidak memiliki hukum; bentuk pemerintahan terbaik adalah demokrasi, kemudian oligarki, dan yang terburuk adalah tirani (Rapar, 1991).

Hal yang menarik dari teori yang terakhir ini adalah terdapat dua bentuk demokrasi, yaitu demokrasi di negara-negara dengan hukum dan demokrasi di negara-negara tanpa hukum. Demokrasi negara hukum adalah bentuk terburuk, sedangkan demokrasi negara tanpa hukum adalah bentuk terbaik. Jelas juga bahwa kedua bentuk demokrasi itu memiliki tempat yang lebih baik daripada oligarki yang berdiri di atas demokrasi di sebuah republik.

Menurut analisis Plato, tidak semua bentuk pemerintahan bersifat kekal dan abadi, sesuai dengan sifat dan kondisi jiwa manusia yang selalu berubah. Negara aristokrat, yang menurut Plato adalah pemerintahan yang terbaik, bisa berubah menjadi sistem timokratis, karena pemimpinnya tidak lagi memperhatikan kepentingan rakyatnya bahkan tidak mengesampingkan terciptanya negara tirani. bagaimana mengatur sistem pemerintahan secara bijaksana, selalu berpedoman pada kebaikan bersama, sehingga semua warga negara dapat menikmati keadilan dan kebajikan secara setara.

V. KESIMPULAN

Menurut Plato, negara ideal adalah komunitas etis untuk perolehan kebajikan. Pada dasarnya negara adalah sebuah keluarga di mana mereka yang menjadi warga negaranya memelihara persaudaraan. Plato juga mengatakan bahwa negara sebenarnya diciptakan atau dibentuk oleh rakyat. Terbentuknya negara adalah karena keinginan dan kebutuhan rakyat, yang tidak dapat dipenuhi sendiri-sendiri. Penting bahwa negara harus menjadikan dirinya sebagai sistem pelayanan, sehingga keberadaan negara dibutuhkan setiap saat. Menurutnya, tujuan negara adalah mewujudkan kebahagiaan dan kebahagiaan seluruh warga negara yang dilandasi oleh keadilan, kebijaksanaan, keberanian atau semangat dan pengendalian diri dalam kerukunan dan keserasian dalam kehidupan bernegara. Untuk mencapai tujuan negara, warga negara harus memiliki pengetahuan, terutama ide-ide bagus, dan menerapkannya di semua bidang kehidupan.

Yang diinginkan Plato sebagai bentuk pemerintahan adalah "negara aristokrat", yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh para intelektual atau filsuf yang bijak yang dibimbing oleh keadilan. Filsuf seperti Pythagoras menerapkan negara utopis Plato, tetapi mengalami kemunduran dalam perkembangannya karena perang. Dari konsep negara utopis Plato, yang terpenting adalah kandungan nilai-nilai etis, yang tentunya sangat berkaitan dengan realitas manusia saat ini, dimana nilai-nilai tersebut sedang diperjuangkan di kalangan masyarakat kita saat ini.

DAFTAR REFERENSI

Gaarder, Jostein, (1998). *Sophie's World*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dengan judul *Dunia Sophie: Sebuah Novel Filsafat*, Bandung: Mizan.

Hadiwijono, Harun, (1993). *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, Yogyakarta: Kanisius.

Haryadi, Edy, (2000). *Lenin: Pikiran, Tindakan dan Ucapan*, Jakarta: Komunitas Studi Untuk Perubahan.

Hatta, Mohammad, (1996). *Alam Pikiran Yunani*, Jakarta: Penerbit Uni-versitas Indonesia.

Mulia, Musdah, (2001). *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina.

Patria, Nazar dan Andi Arief, (1999). *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rapar, J.H., (1991). *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: CV. Rajawali.

Russell, Bertrand, (2007). *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Terj. Sigit Jatmiko dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suseno, Franz Magnis, (1997). *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad-19*, Yogyakarta: Kanisius.

Tim Maula (ed.), (1999). *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah.

Tim Penulis Rosda, (1995). *Kamus Filsafat*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Titus, Harold H., et.al., (1984). Persoalan-persoalan Filsafat, Terj. M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang.